

**STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
BERBASIS AKRUAL**

PERNYATAAN NO. 01

PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

**KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
DESEMBER 2008**

DAFTAR ISI

	Paragraf
PENDAHULUAN	1 - 7
TUJUAN	1
RUANG LINGKUP	2 - 4
BASIS AKUNTANSI	5 - 7
DEFINISI	8
TUJUAN LAPORAN KEUANGAN	9 - 12
TANGGUNG JAWAB PELAPORAN KEUANGAN	13
KOMPONEN-KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN	14 - 24
STRUKTUR DAN ISI	25
PENDAHULUAN	25 - 26
Identifikasi Laporan Keuangan	27 - 31
Periode Pelaporan.....	32 - 33
Tepat Waktu.....	34
LAPORAN REALISASI ANGGARAN	35 - 40
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH	41 - 43
NERACA	44 - 86
Klasifikasi.....	45 - 53
Aset Lancar.....	54 - 55
Aset Nonlancar	56 - 66
Pengakuan Aset.....	67 - 68
Pengukuran Aset	69 - 74
Kewajiban Jangka Pendek	75 - 77
Kewajiban Jangka Panjang	78 - 80
Pengakuan Kewajiban	81 - 82
Pengukuran Kewajiban	83
Ekuitas Dana	84 - 85
INFORMASI YANG DISAJIKAN DALAM NERACA ATAU DALAM CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	86 - 88
LAPORAN ARUS KAS	89 - 91
LAPORAN OPERASIONAL	92 - 100
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	101 - 103
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	104 - 114
Struktur	104 - 107
Penyajian Kebijakan-kebijakan Akuntansi.....	108 - 112
Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya.....	113
TANGGAL EFEKTIF	114

Lampiran :

Lampiran 01 A : Contoh Format Neraca Pemerintah Pusat

- Lampiran 01 B : Contoh Format Neraca Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota**
- Lampiran 01 C : Contoh Format Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Pusat**
- Lampiran 01 D : Contoh Format Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota**
- Lampiran 01 E : Contoh Format Laporan Perubahan SAL Pemerintah Pusat**
- Lampiran 01 F : Contoh Format Laporan Perubahan SAL Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota**

1 STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

2 BERBASIS AKRUAL

3 PERNYATAAN NO. 01

4 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

5 *Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah*
6 *paragraf standar, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf*
7 *penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual*
8 *Akuntansi Pemerintahan.*

9 PENDAHULUAN

10 Tujuan

11 1. Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur penyajian
12 laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial*
13 *statements*) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan
14 keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas.
15 Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang
16 ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar
17 pengguna laporan. Untuk mencapai tujuan tersebut, standar ini
18 menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan
19 keuangan, pedoman struktur laporan keuangan, dan persyaratan
20 minimum isi laporan keuangan. Laporan keuangan disusun dengan
21 menerapkan basis akrual. Pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan
22 transaksi-transaksi spesifik dan peristiwa-peristiwa yang lain, diatur dalam
23 standar akuntansi pemerintahan lainnya.

24 Ruang Lingkup

25 **2. Laporan keuangan untuk tujuan umum disusun dan disajikan**
26 **dengan basis akrual.**

27 3. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang
28 dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Yang dimaksud
29 dengan pengguna adalah masyarakat, termasuk lembaga legislatif,
30 pemeriksa/pengawas, fihak yang memberi atau berperan dalam proses
31 donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah. Laporan keuangan
32 meliputi laporan keuangan yang disajikan terpisah atau bagian dari
33 laporan keuangan yang disajikan dalam dokumen publik lainnya seperti
34 laporan tahunan.

35 **4. Pernyataan Standar ini berlaku untuk entitas pelaporan**
36 **dalam menyusun laporan keuangan suatu entitas pemerintah pusat,**
37 **pemerintah daerah, dan laporan keuangan konsolidasian, tidak termasuk**
38 **perusahaan negara/daerah.**

1 **Basis Akuntansi**

2 **5. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan**
3 **pemerintah yaitu basis akrual.**

4 6. Entitas pelaporan menyelenggarakan akuntansi dan
5 penyajian laporan keuangan dengan menggunakan basis akrual baik
6 dalam pengakuan pendapatan dan beban, maupun pengakuan aset,
7 kewajiban, dan ekuitas dana.

8 **7. Entitas pelaporan yang menyelenggarakan akuntansi**
9 **berbasis akrual, menyajikan Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan**
10 **basis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang**
11 **anggaran.**

12 **DEFINISI**

13 **8. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam**
14 **Pernyataan Standar dengan pengertian:**

15 **Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan**
16 **pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan**
17 **pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut**
18 **klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.**

19 **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana**
20 **keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan**
21 **Perwakilan Rakyat Daerah.**

22 **Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana**
23 **keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan**
24 **Perwakilan Rakyat.**

25 **Apropriasi merupakan anggaran yang disetujui DPR/DPRD yang**
26 **merupakan mandat yang diberikan kepada Presiden/gubernur/bupati/**
27 **walikota untuk melakukan pengeluaran-pengeluaran sesuai tujuan yang**
28 **ditetapkan.**

29 **Arus Kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada**
30 **Bendahara Umum Negara/Daerah.**

31 **Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh**
32 **pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana**
33 **manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat**
34 **diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur**
35 **dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang**
36 **diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-**
37 **sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.**

38 **Aset tak berwujud adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi**
39 **dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam**
40 **menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya**
41 **termasuk hak atas kekayaan intelektual.**

1 **Aset tetap** adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih
2 dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah
3 atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

4 **Basis akrual** adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi
5 dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa
6 memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

7 **Basis kas** adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan
8 peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

9 **Belanja** adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum
10 Negara/Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode
11 tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh
12 pembayarannya kembali oleh pemerintah.

13 **Beban** adalah penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa dalam
14 periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dana, yang dapat berupa
15 pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

16 **Dana Cadangan** adalah dana yang disisihkan untuk menampung
17 kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat
18 dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

19 **Ekuitas Dana** adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan
20 selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

21 **Entitas Akuntansi** adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/
22 pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan
23 akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada
24 entitas pelaporan.

25 **Entitas Pelaporan** adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau
26 lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-
27 undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa
28 laporan keuangan.

29 **Investasi** adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat
30 ekonomik seperti bunga, dividen, dan royalti, atau manfaat sosial
31 sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka
32 pelayanan kepada masyarakat

33 **Kas** adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat
34 dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

35 **Kas Daerah** adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan
36 oleh Bendaharawan Umum Daerah untuk menampung seluruh
37 penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah.

38 **Kas Negara** adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan
39 oleh Menteri Keuangan selaku Bendaharawan Umum Negara untuk
40 menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah pusat.

41 **Kebijakan akuntansi** adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-
42 konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh

1 suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan
2 keuangan.

3 Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang
4 mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan
5 bersama dengan menggunakan aset dan atau hak usaha yang dimiliki.

6 Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang
7 penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi
8 pemerintah

9 Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang
10 merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan
11 sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.

12 Laporan keuangan interim adalah laporan keuangan yang diterbitkan di
13 antara dua laporan keuangan tahunan.

14 Mata uang asing adalah mata uang selain mata uang pelaporan entitas.

15 Mata uang pelaporan adalah mata uang rupiah yang digunakan dalam
16 menyajikan laporan keuangan.

17 Materialitas adalah suatu kondisi jika tidak tersajikannya atau salah saji
18 suatu informasi akan mempengaruhi keputusan atau penilaian pengguna
19 yang dibuat atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada
20 hakikat atau besarnya pos atau kesalahan yang dipertimbangkan dari
21 keadaan khusus di mana kekurangan atau salah saji terjadi.

22 Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar
23 pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi
24 wajar.

25 Otorisasi Kredit Anggaran (allotment) adalah dokumen pelaksanaan
26 anggaran yang menunjukkan bagian dari apropriasi yang disediakan
27 bagi instansi dan digunakan untuk memperoleh uang dari Bendahara
28 Umum Negara/Daerah guna membiayai pengeluaran-pengeluaran
29 selama periode otorisasi tersebut.

30 Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar
31 kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada
32 tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran
33 berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama
34 dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus
35 anggaran.

36 Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui
37 sebagai penambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang
38 bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

39 Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum
40 Negara/Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode
41 tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan
42 tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

1 **Penyusutan** adalah alokasi nilai aset tetap yang dapat disusutkan selama
2 masa manfaat aset yang bersangkutan.

3 **Persediaan** adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan
4 yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah,
5 dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan
6 dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

7 **Piutang transfer** adalah hak suatu entitas pelaporan untuk menerima
8 pembayaran dari entitas pelaporan lain sebagai akibat peraturan
9 perundang-undangan.

10 **Pos luar biasa** adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang
11 terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi
12 biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar
13 kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

14 **Rekening Kas Umum Negara** adalah rekening tempat penyimpanan uang
15 negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum
16 Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar
17 seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.

18 **Rekening Kas Umum Daerah** adalah rekening tempat penyimpanan uang
19 daerah yang ditentukan oleh gubernur/bupati/walikota untuk
20 menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh
21 pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

22 **Saldo Anggaran Lebih** adalah gunggung saldo yang berasal dari
23 akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun
24 berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

25 **Selisih kurs** adalah selisih yang timbul karena penjabaran mata uang
26 asing ke rupiah pada kurs yang berbeda.

27 **Setara kas** adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap
28 dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang
29 signifikan.

30 **Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)** adalah selisih
31 lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta
32 penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/APBD selama
33 satu periode pelaporan.

34 **Surplus/defisit-LO** adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban
35 selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan pos luar biasa.

36 **Surplus/defisit-LRA** adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA
37 dan belanja selama satu periode pelaporan.

38 **Tanggal pelaporan** adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode
39 pelaporan.

40 **Transfer** adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas
41 pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana
42 perimbangan dan dana bagi hasil.

1 **Utang transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk**
2 **melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan**
3 **perundang-undangan.**

4 **TUJUAN LAPORAN KEUANGAN**

5 9. Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur
6 mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh
7 suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah
8 menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, *realisasi anggaran, arus*
9 *kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas* suatu entitas pelaporan yang
10 bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi
11 keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan
12 pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi
13 yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan
14 akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan
15 kepadanya, dengan:

- 16 a) menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi,
17 kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
- 18 b) menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya
19 ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
- 20 c) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan
21 sumber daya ekonomi;
- 22 d) menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap
23 anggarannya;
- 24 e) menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai
25 aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- 26 f) menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk
27 membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- 28 g) menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi
29 kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

30 10. Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai
31 peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna
32 untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi
33 yang berkelanjutan, sumberdaya yang dihasilkan dari operasi yang
34 berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan
35 keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

- 36 a) indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai
37 dengan anggaran; dan
- 38 b) indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan
39 ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh
40 DPR/DPRD.

41 11. Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan
42 menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:

- 1 a. aset;
- 2 b. kewajiban;
- 3 c. ekuitas dana;
- 4 d. pendapatan-LRA;
- 5 e. belanja;
- 6 f. transfer;
- 7 g. pembiayaan;
- 8 h. pendapatan-LO;
- 9 i. beban; dan
- 10 j. arus kas.

11 12. Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk
12 memenuhi tujuan sebagaimana terdapat dalam paragraf 9, namun tidak
13 dapat sepenuhnya memenuhi tujuan tersebut. Informasi tambahan,
14 termasuk laporan nonkeuangan, dapat dilaporkan bersama-sama
15 dengan laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih
16 komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu
17 periode.

18 **TANGGUNG JAWAB PELAPORAN KEUANGAN**

19 13. Tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan
20 keuangan berada pada pimpinan entitas.

21 **KOMPONEN-KOMPONEN LAPORAN** 22 **KEUANGAN**

23 14. *Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set*
24 *laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran*
25 *(budgetary/statutory reports) dan laporan finansial, sehingga seluruh*
26 *komponen menjadi sebagai berikut:*

- 27 **a) Laporan Realisasi Anggaran;**
- 28 **b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;**
- 29 **c) Neraca;**
- 30 **d) Laporan Operasional;**
- 31 **e) Laporan Arus Kas;**
- 32 **f) Laporan Perubahan Ekuitas;**
- 33 **g) Catatan atas Laporan Keuangan.**

34 15. *Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan*
35 *oleh setiap entitas pelaporan, kecuali Laporan Arus Kas yang hanya*
36 *disajikan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.*

1 16. Unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan adalah unit
2 yang ditetapkan sebagai bendaharawan umum negara/daerah
3 dan/atau sebagai kuasa bendaharawan umum negara/daerah.

4 17. Kegiatan keuangan pemerintah dibatasi dengan anggaran
5 dalam bentuk apropriasi atau otorisasi anggaran. Laporan keuangan
6 menyediakan informasi mengenai apakah sumber daya ekonomi telah
7 diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran yang telah
8 ditetapkan. Laporan Realisasi Anggaran memuat anggaran dan realisasi.

9 18. Entitas pelaporan juga menyajikan Saldo Anggaran Lebih
10 pemerintah yang mencakup Saldo Anggaran Lebih tahun sebelumnya,
11 penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan
12 Anggaran (SiLPA/SiKPA) tahun berjalan, dan penyesuaian lain yang
13 diperkenankan.

14 19. Laporan keuangan memberikan informasi tentang sumber
15 daya ekonomi dan kewajiban entitas pelaporan pada tanggal
16 pelaporan dan arus sumber daya ekonomi selama periode berjalan.
17 Informasi ini diperlukan pengguna untuk melakukan penilaian terhadap
18 kemampuan entitas pelaporan dalam menyelenggarakan kegiatan
19 pemerintahan di masa mendatang.

20 20. Entitas pelaporan menyajikan informasi untuk membantu
21 para pengguna dalam memperkirakan hasil operasi entitas dan
22 pengelolaan aset, seperti halnya dalam pembuatan dan evaluasi
23 keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi.

24 21. Entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan
25 menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas
26 dan setara kas selama suatu periode akuntansi dan saldo kas dan setara
27 kas pada tanggal pelaporan.

28 22. Entitas pelaporan menyajikan kekayaan bersih pemerintah
29 yang mencakup surplus/defisit tahun sebelumnya, surplus/defisit tahun
30 berjalan, dan dampak kumulatif akibat perubahan kebijakan dan
31 kesalahan mendasar.

32 23. Untuk menghindari kesalahpahaman dalam membaca
33 laporan keuangan, entitas pelaporan harus mengungkapkan semua
34 informasi penting baik yang telah tersaji maupun yang tidak tersaji dalam
35 lembar muka laporan keuangan.

36 24. Entitas pelaporan mengungkapkan informasi tentang
37 ketaatan terhadap anggaran.

38 **STRUKTUR DAN ISI**

39 **Pendahuluan**

40 25. Pernyataan Standar ini mensyaratkan adanya
41 pengungkapan tertentu pada lembar muka (*on the face*) laporan
42 keuangan, mensyaratkan pengungkapan pos-pos lainnya dalam lembar

1 muka laporan keuangan atau dalam Catatan atas Laporan Keuangan,
2 dan merekomendasikan format sebagai lampiran standar ini yang dapat
3 diikuti oleh suatu entitas pelaporan sesuai dengan situasi masing-masing.

4 26. Pernyataan Standar ini menggunakan istilah
5 pengungkapan dalam arti yang seluas-luasnya, meliputi pos-pos yang
6 disajikan dalam setiap lembar muka laporan keuangan maupun dalam
7 Catatan atas Laporan Keuangan. Pengungkapan yang disyaratkan
8 dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan lainnya disajikan
9 sesuai dengan ketentuan dalam standar tersebut. Kecuali ada standar
10 yang mengatur sebaliknya, pengungkapan yang demikian dibuat pada
11 lembar muka laporan keuangan yang relevan atau dalam Catatan atas
12 Laporan Keuangan.

13 **Identifikasi Laporan Keuangan**

14 **27. Laporan keuangan diidentifikasi dan dibedakan secara**
15 **jelas dari informasi lainnya dalam dokumen terbitan yang sama.**

16 **28. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan hanya berlaku**
17 **untuk laporan keuangan dan tidak untuk informasi lain yang disajikan**
18 **dalam suatu laporan tahunan atau dokumen lainnya. Oleh karena itu,**
19 **penting bagi pengguna untuk dapat membedakan informasi yang**
20 **disajikan menurut Standar Akuntansi Pemerintahan dari informasi lain,**
21 **namun bukan merupakan subyek yang diatur dalam Pernyataan Standar**
22 **ini.**

23 29. Setiap komponen laporan keuangan harus diidentifikasi
24 secara jelas. Di samping itu, informasi berikut harus dikemukakan secara
25 jelas dan diulang pada setiap halaman laporan bilamana perlu untuk
26 memperoleh pemahaman yang memadai atas informasi yang disajikan:

- 27 a) nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya;
28 b) cakupan laporan keuangan, apakah satu entitas tunggal atau
29 konsolidasian dari beberapa entitas pelaporan;
30 c) tanggal pelaporan atau periode yang dicakup oleh laporan
31 keuangan, yang sesuai dengan komponen-komponen laporan
32 keuangan;
33 d) mata uang pelaporan; dan
34 e) tingkat ketepatan yang digunakan dalam penyajian angka-angka
35 pada laporan keuangan.

36 30. Persyaratan dalam paragraf 26 dapat dipenuhi dengan
37 penyajian judul dan judul kolom yang singkat pada setiap halaman
38 laporan keuangan. Berbagai pertimbangan digunakan untuk pengaturan
39 tentang penomoran halaman, referensi, dan susunan lampiran sehingga
40 dapat mempermudah pengguna dalam memahami laporan keuangan.

1 31. Laporan keuangan seringkali lebih mudah dimengerti
2 bilamana informasi disajikan dalam ribuan atau jutaan rupiah. Penyajian
3 demikian ini dapat diterima sepanjang tingkat ketepatan dalam
4 penyajian angka-angka diungkapkan dan informasi yang relevan tidak
5 hilang.

6 **Periode Pelaporan**

7 **32. Laporan keuangan disajikan sekurang-kurangnya sekali**
8 **dalam setahun. Dalam situasi tertentu, tanggal laporan suatu entitas**
9 **berubah dan laporan keuangan tahunan disajikan dengan suatu periode**
10 **yang lebih panjang atau lebih pendek dari satu tahun, entitas pelaporan**
11 **mengungkapkan informasi berikut:**

12 **a) alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun,**

13 **b) fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif untuk laporan tertentu seperti**
14 **arus kas dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.**

15 33. Dalam situasi tertentu suatu entitas pelaporan harus
16 mengubah tanggal pelaporannya, misalnya sehubungan dengan
17 adanya perubahan tahun anggaran. Pengungkapan atas perubahan
18 tanggal pelaporan adalah penting agar pengguna menyadari kalau
19 jumlah-jumlah yang disajikan untuk periode sekarang dan jumlah-jumlah
20 komparatif tidak dapat diperbandingkan. Contoh selanjutnya adalah
21 dalam masa transisi dari akuntansi berbasis kas ke akrual, suatu entitas
22 pelaporan mengubah tanggal pelaporan entitas-entitas akuntansi yang
23 berada dalam entitas pelaporan untuk memungkinkan penyusunan
24 laporan keuangan konsolidasian.

25 **Tepat Waktu**

26 34. Kegunaan laporan keuangan berkurang bilamana laporan
27 tidak tersedia bagi pengguna dalam suatu periode tertentu setelah
28 tanggal pelaporan. Faktor-faktor yang dihadapi seperti kompleksitas
29 operasi suatu entitas pelaporan bukan merupakan alasan yang cukup
30 atas kegagalan pelaporan yang tepat waktu. Batas waktu penyampaian
31 laporan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun
32 anggaran. Kementerian Negara/Lembaga dua bulan setelah berakhirnya
33 tahun anggaran.

34 **Laporan Realisasi Anggaran**

35 **35. Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan**
36 **keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan**
37 **terhadap APBN/APBD.**
38

1 36. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber,
2 alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh
3 pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan

4 **37. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-**
5 **kurangnya unsur-unsur sebagai berikut:**

6 **a. Pendapatan-LRA;**

7 **b. belanja;**

8 **c. transfer;**

9 **d. surplus/defisit-LRA;**

10 **e. pembiayaan;**

11 **f. sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.**

12 **38. Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan**
13 **perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode**
14 **pelaporan.**

15 39. Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam
16 Catatan atas Laporan Keuangan. Penjelasan tersebut memuat hal-hal
17 yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan
18 moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara
19 anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut
20 angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

21 40. PSAP No. 02 mengatur persyaratan-persyaratan untuk
22 penyajian Laporan Realisasi Anggaran dan pengungkapan informasi
23 terkait.

24

25 **Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih**

26 **41. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan**
27 **sekurang-kurangnya pos-pos:**

28 **a) Saldo Anggaran Lebih awal;**

29 **b) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;**

30 **c) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;**

31 **d) Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya; dan**

32 **e) Lain-lain.**

33 **42. Di samping itu, suatu entitas pelaporan menyajikan rincian**
34 **lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan**
35 **Saldo Anggaran Lebih dalam Catatan atas Laporan Keuangan.**

36 43. Contoh format Laporan Perubahan Ekuitas disajikan pada
37 lampiran PSAP 01 E dan 01 F.

1

2

Neraca

3

4

5

44. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

6

Klasifikasi

7

8

9

45. Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca.

10

11

12

13

14

46. Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

15

16

17

18

19

20

47. Apabila suatu entitas pelaporan menyediakan barang-barang yang akan digunakan dalam menjalankan kegiatan pemerintahan, perlu adanya klasifikasi terpisah antara aset lancar dan nonlancar dalam neraca untuk memberikan informasi mengenai barang-barang yang akan digunakan dalam periode akuntansi berikutnya dan yang akan digunakan untuk keperluan jangka panjang.

21

22

23

24

25

26

27

48. Informasi tentang tanggal jatuh tempo aset dan kewajiban keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas pelaporan. Informasi tentang tanggal penyelesaian aset nonkeuangan dan kewajiban seperti persediaan dan cadangan juga bermanfaat untuk mengetahui apakah aset diklasifikasikan sebagai aset lancar dan nonlancar dan kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.

28

29

49. Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut:

30

31

32

33

34

35

36

37

38

- a) kas dan setara kas;**
- b) investasi jangka pendek;**
- c) piutang pajak dan bukan pajak;**
- d) persediaan;**
- e) investasi jangka panjang;**
- f) aset tetap;**
- g) kewajiban jangka pendek;**
- h) kewajiban jangka panjang;**
- i) ekuitas dana.**

1 **50. Pos-pos selain yang disebutkan pada paragraf 43 disajikan**
2 **dalam Neraca jika Standar Akuntansi Pemerintahan mensyaratkan, atau**
3 **jika penyajian demikian perlu untuk menyajikan secara wajar posisi**
4 **keuangan suatu entitas pelaporan.**

5 51. Contoh format Neraca disajikan dalam Lampiran PSAP 01.A
6 dan 01.B Standar ini. Lampiran hanya merupakan ilustrasi dan bukan
7 merupakan bagian dari standar. Tujuan lampiran ini adalah
8 mengilustrasikan penerapan standar untuk membantu dalam pelaporan
9 keuangan.

10 52. Pertimbangan disajikannya pos-pos tambahan secara
11 terpisah didasarkan pada faktor-faktor berikut ini:

- 12 a) Sifat, likuiditas, dan materialitas aset;
13 b) Fungsi pos-pos tersebut dalam entitas pelaporan;
14 c) Jumlah, sifat, dan jangka waktu kewajiban.

15 53. Aset dan kewajiban yang berbeda dalam sifat dan fungsi
16 kadang-kadang diukur dengan dasar pengukuran yang berbeda.
17 Sebagai contoh, sekelompok aset tetap tertentu dicatat atas dasar biaya
18 perolehan dan kelompok lainnya dicatat atas dasar nilai wajar yang
19 diestimasikan.

20 **Aset Lancar**

21 **54. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika:**

22 **a) diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk**
23 **dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan,**
24 **atau**

25 **b) berupa kas dan setara kas.**

26 **Semua aset selain yang termasuk dalam (a) dan (b), diklasifikasikan**
27 **sebagai aset nonlancar.**

28 55. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka
29 pendek, piutang, dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek
30 antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan, surat
31 berharga yang mudah diperjualbelikan. Pos-pos piutang antara lain
32 piutang pajak, retribusi, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi,
33 dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua
34 belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Persediaan mencakup barang
35 atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya
36 barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti
37 komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti
38 komponen bekas.

Aset Nonlancar

56. Aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud, yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum.

57. Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya untuk mempermudah pemahaman atas pos-pos aset nonlancar yang disajikan di neraca.

58. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang terdiri dari investasi nonpermanen dan investasi permanen.

59. Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

60. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

61. Investasi nonpermanen terdiri dari:

- a) Investasi dalam Surat Utang Negara;**
- b) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga; dan**
- c) Investasi nonpermanen lainnya**

62. Investasi permanen terdiri dari:

- a) Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan negara/perusahaan daerah, lembaga keuangan negara, badan hukum milik negara, badan internasional dan badan hukum lainnya bukan milik negara.**
- b) Investasi permanen lainnya.**

63. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

64. Aset tetap terdiri dari:

- a) Tanah;**
- b) Peralatan dan mesin;**
- c) Gedung dan bangunan;**
- d) Jalan, irigasi, dan jaringan;**
- e) Aset tetap lainnya; dan**
- f) Konstruksi dalam pengerjaan.**

65. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.

1 **66. Aset nonlancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya.**
2 **Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan**
3 **penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan,**
4 **dan aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan).**

5 **Pengakuan Aset**

6 **67. Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa**
7 **depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang**
8 **dapat diukur dengan andal.**

9 **68. Aset diakui pada saat diterima atau kepemilikannya**
10 **dan/atau penguasaannya berpindah.**

11 **Pengukuran Aset**

12 **69. Pengukuran aset adalah sebagai berikut:**

13 **a) Kas dicatat sebesar nilai nominal;**

14 **b) Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan;**

15 **c) Piutang dicatat sebesar nilai nominal;**

16 **d) Persediaan dicatat sebesar:**

17 **(1) Biaya Perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;**

18 **(2) Biaya Standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;**

19 **(3) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti**
20 **donasi/rampasan.**

21 **70. Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan**
22 **termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh**
23 **kepemilikan yang sah atas investasi tersebut;**

24 **71. Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila**
25 **penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak**
26 **memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada**
27 **saat perolehan.**

28 **72. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset**
29 **tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.**

30 **73. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara**
31 **swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan**
32 **biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan,**
33 **perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya**
34 **yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.**

35 **74. Aset moneter dalam mata uang asing dijabarkan dan**
36 **dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing**
37 **menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.**

1 **Kewajiban Jangka Pendek**

2 **75. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka**
3 **pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan**
4 **setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan**
5 **sebagai kewajiban jangka panjang.**

6 76. Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan
7 cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek,
8 seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai
9 merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun
10 pelaporan berikutnya.

11 77. Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang
12 jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal
13 pelaporan. Misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak
14 ketiga, utang perhitungan pihak ketiga (PFK), dan bagian lancar utang
15 jangka panjang.

16 **Kewajiban Jangka Panjang**

17 **78. Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban**
18 **jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan untuk**
19 **diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal**
20 **pelaporan jika:**

21 **a) jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas)**
22 **bulan;**

23 **b) entitas bermaksud mendanai kembali (refinance) kewajiban tersebut**
24 **atas dasar jangka panjang; dan**

25 **c) maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian**
26 **pendanaan kembali (refinancing), atau adanya penjadwalan kembali**
27 **terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan**
28 **disetujui.**

29 **Jumlah setiap kewajiban yang dikeluarkan dari kewajiban jangka**
30 **pendek sesuai dengan paragraf ini, bersama-sama dengan informasi**
31 **yang mendukung penyajian ini, diungkapkan dalam Catatan atas**
32 **Laporan Keuangan.**

33 79. Beberapa kewajiban yang jatuh tempo untuk dilunasi pada
34 tahun berikutnya mungkin diharapkan dapat didanai kembali
35 (refinancing) atau digulirkan (roll over) berdasarkan kebijakan entitas
36 pelaporan dan diharapkan tidak akan segera menyerap dana entitas.
37 Kewajiban yang demikian dipertimbangkan untuk menjadi suatu bagian
38 dari pembiayaan jangka panjang dan diklasifikasikan sebagai kewajiban
39 jangka panjang. Namun dalam situasi di mana kebijakan pendanaan
40 kembali tidak berada pada entitas (seperti dalam kasus tidak adanya
41 persetujuan pendanaan kembali), pendanaan kembali ini tidak dapat

1 dipertimbangkan secara otomatis dan kewajiban ini diklasifikasikan
2 sebagai pos jangka pendek kecuali penyelesaian atas perjanjian
3 pendanaan kembali sebelum persetujuan laporan keuangan
4 membuktikan bahwa substansi kewajiban pada tanggal pelaporan
5 adalah jangka panjang.

6 80. Beberapa perjanjian pinjaman menyertakan persyaratan
7 tertentu (*covenant*) yang menyebabkan kewajiban jangka panjang
8 menjadi kewajiban jangka pendek (*payable on demand*) jika
9 persyaratan tertentu yang terkait dengan posisi keuangan peminjam
10 dilanggar. Dalam keadaan demikian, kewajiban dapat diklasifikasikan
11 sebagai kewajiban jangka panjang hanya jika:

- 12 a) pemberi pinjaman telah menyetujui untuk tidak meminta pelunasan
13 sebagai konsekuensi adanya pelanggaran, dan
14 b) tidak mungkin terjadi pelanggaran berikutnya dalam waktu 12 (dua
15 belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

16 **Pengakuan Kewajiban**

17 **81. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa**
18 **pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk**
19 **menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas**
20 **kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur**
21 **dengan andal.**

22 **82. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau**
23 **pada saat kewajiban timbul.**

24 **Pengukuran Kewajiban**

25 **83. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam**
26 **mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.**
27 **Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral**
28 **pada tanggal neraca.**

29 **Ekuitas Dana**

30 **84. Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang**
31 **merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal**
32 **laporan.**

33 85. Saldo ekuitas dana di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas
34 dana pada Laporan Perubahan Ekuitas.

Informasi yang Disajikan dalam Neraca atau dalam Catatan atas Laporan Keuangan

86. Suatu entitas pelaporan mengungkapkan, baik dalam Neraca maupun dalam Catatan atas Laporan Keuangan subklasifikasi pos-pos yang disajikan, diklasifikasikan dengan cara yang sesuai dengan operasi entitas yang bersangkutan. Suatu pos disubklasifikasikan lebih lanjut, bilamana perlu, sesuai dengan sifatnya.

87. Rincian yang tercakup dalam subklasifikasi di Neraca atau di Catatan atas Laporan Keuangan tergantung pada persyaratan dari Standar Akuntansi Pemerintahan dan materialitas jumlah pos yang bersangkutan. Faktor-faktor yang disebutkan dalam paragraf 84 dapat digunakan dalam menentukan dasar bagi subklasifikasi.

88. Pengungkapan akan bervariasi untuk setiap pos, misalnya:

- (a) piutang dirinci menurut jumlah piutang pajak, retribusi, penjualan, fihak terkait, uang muka, dan jumlah lainnya; piutang transfer dirinci menurut sumbernya;
- (b) persediaan dirinci lebih lanjut sesuai dengan standar yang mengatur akuntansi untuk persediaan;
- (c) aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kelompok sesuai dengan standar yang mengatur tentang aset tetap;
- (d) utang transfer dianalisis menurut entitas penerimanya;
- (e) dana cadangan diklasifikasikan sesuai dengan peruntukannya;
- (f) pengungkapan kepentingan pemerintah dalam perusahaan negara/daerah/lainnya adalah jumlah penyertaan yang diberikan, tingkat pengendalian dan metode penilaian.

Laporan Arus Kas

89. Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

90. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan nonanggaran.

91. Penyajian Laporan Arus Kas dan pengungkapan yang berhubungan dengan arus kas diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 03 tentang Laporan Arus Kas.

Laporan Operasional

92. Laporan keuangan mencakup laporan operasional yang sekurang-kurangnya menyajikan pos-pos sebagai berikut:

- 1 **a) Pendapatan-LO dari kegiatan operasional;**
- 2 **b) Beban dari kegiatan operasional ;**
- 3 **c) Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional, bila ada;**
- 4 **d) Pos luar biasa, bila ada;**
- 5 **e) Surplus/defisit-LO.**

6 **Penambahan pos-pos, judul dan subtotal disajikan dalam laporan**
7 **operasional jika standar ini mensyaratkannya, atau jika diperlukan untuk**
8 **menyajikan dengan wajar hasil operasi suatu entitas pelaporan.**

9 93. Dalam hubungannya dengan laporan operasional, kegiatan
10 operasional suatu entitas pelaporan dapat dianalisis menurut klasifikasi
11 ekonomi atau klasifikasi fungsi/program untuk mencapai tujuan yang
12 telah ditetapkan.

13 94. Penambahan pos-pos pada laporan operasional dan
14 deskripsi yang digunakan serta susunan pos-pos dapat diubah apabila
15 diperlukan untuk menjelaskan operasi dimaksud. Faktor-faktor yang perlu
16 dipertimbangkan meliputi materialitas dan sifat serta fungsi komponen
17 pendapatan-LO dan beban.

18 95. Dalam laporan operasional yang dianalisis menurut suatu
19 klasifikasi beban, beban-beban dikelompokkan menurut klasifikasi
20 ekonomi (sebagai contoh beban penyusutan/amortisasi, beban alat tulis
21 kantor, beban transportasi, dan beban gaji dan tunjangan pegawai), dan
22 tidak direalokasikan pada berbagai fungsi dalam suatu entitas pelaporan.
23 Metode ini sederhana untuk diaplikasikan dalam kebanyakan entitas kecil
24 karena tidak memerlukan alokasi beban operasional pada berbagai
25 fungsi.

26 96. Dalam laporan operasional yang dianalisis menurut klasifikasi
27 fungsi, beban-beban dikelompokkan menurut program atau yang
28 dimaksudkannya. Penyajian laporan ini memberikan informasi yang lebih
29 relevan bagi pemakai dibandingkan dengan laporan menurut klasifikasi
30 ekonomi, walau dalam hal ini pengalokasian beban ke fungsi-fungsi
31 adakalanya bersifat arbitrer dan atas dasar pertimbangan tertentu.

32 97. Entitas pelaporan yang mengelompokkan beban menurut
33 klasifikasi fungsi mengungkapkan pula tambahan informasi beban
34 menurut klasifikasi ekonomi, a.l. meliputi beban penyusutan/amortisasi,
35 beban gaji dan tunjangan pegawai, dan beban bunga pinjaman.

36 98. Untuk memilih metode klasifikasi ekonomi atau klasifikasi
37 fungsi tergantung pada faktor historis dan peraturan perundang-
38 undangan, serta hakikat organisasi. Kedua metode ini dapat memberikan
39 indikasi beban yang mungkin, baik langsung maupun tidak langsung,
40 berbeda dengan *output* entitas pelaporan bersangkutan. Karena
41 penerapan masing-masing metode pada entitas yang berbeda
42 mempunyai kelebihan tersendiri, maka standar ini memperbolehkan
43 entitas pelaporan memilih salah satu metode yang dipandang dapat
44 menyajikan unsur operasi secara layak.

1 99. Dalam Laporan Operasional, surplus/defisit penjualan aset
2 nonlancar dan pendapatan/beban luar biasa dikelompokkan dalam
3 kelompok tersendiri.

4 100. Laporan Operasional disajikan dalam bentuk perbandingan
5 dengan tahun sebelumnya, yang formatnya dapat dilihat pada contoh
6 lampiran PSAP 12 A dan 12 B.

7 8 **Laporan Perubahan Ekuitas**

9 101. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-
10 kurangnya pos-pos:

11 a) Ekuitas awal

12 b) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;

13 c) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas dana,
14 yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh
15 perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar,
16 misalnya:

17 1. koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada
18 periode-periode sebelumnya;

19 2. perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

20 102. Di samping itu, suatu entitas pelaporan menyajikan
21 rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan
22 Perubahan Ekuitas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

23 103. Contoh format Laporan Perubahan Ekuitas disajikan pada
24 lampiran PSAP 01.C dan 01.D.

25 26 **Catatan atas Laporan Keuangan**

27 **Struktur**

28 104. Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami
29 dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya,
30 Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya disajikan dengan
31 susunan sebagai berikut:

32 a) Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;

33 b) Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan
34 ekonomi makro;

35 c) Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun
36 pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam
37 pencapaian target;

- 1 d) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan
2 dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan
3 atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
4 e) Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang
5 disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
6 f) Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar
7 Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka
8 laporan keuangan;
9 g) Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian
10 yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan
11 keuangan.

12 105. Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis.
13 Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo
14 Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan
15 Laporan Perubahan Ekuitas harus mempunyai referensi silang dengan
16 informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

17 106. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau
18 daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam
19 Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih,
20 Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan
21 Ekuitas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah
22 penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar
23 Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya
24 yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan,
25 seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.

26 107. Dalam keadaan tertentu masih dimungkinkan untuk
27 mengubah susunan penyajian atas pos-pos tertentu dalam Catatan atas
28 Laporan Keuangan. Misalnya informasi tingkat bunga dan penyesuaian
29 nilai wajar dapat digabungkan dengan informasi jatuh tempo surat-surat
30 berharga.

31 **Penyajian Kebijakan-kebijakan Akuntansi**

32 108. Bagian kebijakan akuntansi pada Catatan atas Laporan
33 Keuangan menjelaskan hal-hal berikut ini:

- 34 (a) basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan
35 keuangan;
36 (b) sampai sejauh mana kebijakan-kebijakan akuntansi yang berkaitan
37 dengan ketentuan-ketentuan masa transisi Standar Akuntansi
38 Pemerintahan diterapkan oleh suatu entitas pelaporan; dan
39 (c) setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk
40 memahami laporan keuangan.

1 109. Pengguna laporan keuangan perlu mengetahui basis-basis
2 pengukuran yang digunakan sebagai landasan dalam penyajian laporan
3 keuangan. Apabila lebih dari satu basis pengukuran digunakan dalam
4 penyusunan laporan keuangan, maka informasi yang disajikan harus
5 cukup memadai untuk dapat mengindikasikan aset dan kewajiban yang
6 menggunakan basis pengukuran tersebut.

7 110. Dalam menentukan apakah suatu kebijakan akuntansi
8 perlu diungkapkan, manajemen harus mempertimbangkan apakah
9 pengungkapan tersebut dapat membantu pengguna untuk memahami
10 setiap transaksi yang tercermin dalam laporan keuangan. Kebijakan-
11 kebijakan akuntansi yang perlu dipertimbangkan untuk disajikan meliputi,
12 tetapi tidak terbatas pada, hal-hal sebagai berikut:

- 13 (a) Pengakuan pendapatan-LRA dan pendapatan-LO;
- 14 (b) Pengakuan belanja;
- 15 (c) Pengakuan beban;
- 16 (d) Prinsip-prinsip penyusunan laporan konsolidasian;
- 17 (e) Investasi;
- 18 (f) Pengakuan dan penghentian/penghapusan aset berwujud dan
19 tidak berwujud;
- 20 (g) Kontrak-kontrak konstruksi;
- 21 (h) Kebijakan kapitalisasi pengeluaran;
- 22 (i) Kemitraan dengan pihak ketiga;
- 23 (j) Biaya penelitian dan pengembangan;
- 24 (k) Persediaan, baik yang untuk dijual maupun untuk dipakai sendiri;
- 25 (l) Dana cadangan;
- 26 (m) Penjabaran mata uang asing dan lindung nilai.

27 111. Setiap entitas pelaporan perlu mempertimbangkan sifat
28 kegiatan-kegiatan dan kebijakan-kebijakan yang perlu diungkapkan
29 dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Sebagai contoh,
30 pengungkapan informasi untuk pengakuan pajak, retribusi dan bentuk-
31 bentuk lainnya dari iuran wajib (*nonreciprocal revenue*), penjabaran
32 mata uang asing, dan perlakuan akuntansi terhadap selisih kurs.

33 112. Kebijakan akuntansi bisa menjadi signifikan walaupun nilai
34 pos-pos yang disajikan dalam periode berjalan dan sebelumnya tidak
35 material. Selain itu, perlu pula diungkapkan kebijakan akuntansi yang
36 dipilih dan diterapkan yang tidak diatur dalam Pernyataan Standar ini.

37 **Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya**

38 **113. Suatu entitas pelaporan mengungkapkan hal-hal berikut ini**
39 **apabila belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan**
40 **keuangan, yaitu:**

- 1 a. *domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta yurisdiksi dimana entitas*
2 *tersebut beroperasi;*
3 b. *penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya;*
4 c. *ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan*
5 *operasionalnya.*

6 **TANGGAL EFEKTIF**

7 *114. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan ini berlaku*
8 *efektif untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan*
9 *anggaran mulai Tahun Anggaran*